

## Potensi Dana Alternatif Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pameran Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Pandji Sukmana\*, Ismi Nuryati Rochayah  
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Krisnadwipayana  
[pandji@unkris.ac.id](mailto:pandji@unkris.ac.id)

*Submitted: 22/04/2022; Revised: 17/05/2022; Published: 22/06/2022*

### **Abstract**

*This study focuses on the potential and alternatives of local economic development through the 2018 Bekasi Regency Development Exhibition. The local economic potential is owned by Bekasi Regency in each sub-district. And through the Development Exhibition in Bekasi Regency, namely the Bekasi Regency Fair in 2018, products from the local economy of each district are promoted. The method used in this research is qualitative method. The theory used is the theory of the implementation of Edward III's public policy that uses communication variables, namely transmission, clarity and consistency. Based on research conducted in the Bekasi Regency Fair in 2018 successfully developed the local economy by promoting its products on the stands available at the exhibition area. This success is due to the implementation of public policies that they do meet the variables of communication, namely transmission, clarity and consistency.*

*Keywords: local economy, development exhibition, Bekasi Regency fair.*

### **Pendahuluan.**

Permasalahan yang selalu dialami oleh sebagian negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia dalam bidang pembangunan adalah kesenjangan atau disparitas wilayah. Disparitas wilayah merupakan masalah pembangunan antar-wilayah yang tidak merata. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar-wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Indonesia dilakukan dengan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau disebut juga sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan “suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota, wilayah regional maupun kota-kota besar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk

menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik. Melalui proses ini diciptakan dan dikembangkan suatu budaya kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas” (World Bank, 2001).

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumberdaya lokal ini dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal.

Pendekatan konsep pengembangan ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dan berinisiatif dalam menentukan dan mengolah sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam untuk menciptakan mata rantai perekonomian. Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sumberdaya lokal seperti ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya perekonomian lokal, sehingga mampu bersaing dengan wilayah disekitarnya untuk mengurangi adanya disparitas wilayah.

Globalisasi dan pengentasan kemiskinan yang merupakan agenda utama dari *Millenium Development Goals* (MDGs) menuntut pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan secara cepat dan tepat untuk meningkatkan perekonomian. Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (kabupaten/kota) untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki keunggulan daya saing, baik untuk pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Pembangunan masyarakat seringkali memakai istilah pemberdayaan masyarakat, karena dalam perkembangannya istilah pemberdayaan ini telah menjadi wacana (*discourse*) publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci (*key word*) bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat (Huraerah, 2011: 95). Hal tersebut sejalan dan dapat dibuktikan dengan banyaknya program-program pemerintah yang bertepatan pemberdayaan, mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (1994-1998), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos

KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan sebagainya.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses yang dilakukan pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terkait untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru. Sedangkan menurut *World Bank* (2001) adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Nurzaman: 2002).

Salah satu pemerintah daerah yang mempunyai perhatian terhadap ekonomi local daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terdapat 23 kecamatan di kabupaten Bekasi, dan masing-masing kecamatan tersebut mempunyai ekonomi lokal khas tersendiri. Produk ekonomi lokal dari 23 kecamatan tersebut juga beragam. Ada yang berupa hasil bumi dan olahannya, dan ada juga berupa karya seni dan kerajinan tangan. Hasil produksi khas dari berbagai kecamatan yang tersebar di kecamatan pemerintahan Kabupaten Bekasi mempunyai nilai ekonomis tersendiri, yang dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mempunyai cara yang unik dalam mempromosikan dan mengembangkan ekonomi lokal daerahnya. Cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan cara menyelenggarakan Pekan Raya Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan di Kawasan Stadion Kecamatan Sukatani, Cikarang Timur pada 15-24 Oktober 2018. Agenda utama dari Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2018 adalah pameran. Pameran tersebut diikuti diantaranya diikuti oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi dan menampilkan Produksi Potensi Daerah. Produksi Potensi Daerah berasal dari berbagai koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM), dan pengrajin. Tema yang diangkatpun menggambarkan semangat pada pengembangan ekonomi lokal yang

berbunyi “Menjadikan Kabupaten Bersinar Melalui UMKM dan IMKM yang Berdaya Saing”.

### **Kajian Pustaka**

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002)

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan public biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2016: 136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

1. Transmisi;  
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara bagaimana melihat dan mempelajari gejala atau realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2009: 94).

### **Pembahasan**

Pameran Pembangunan di Kabupaten Bekasi yang disebut Pekan Raya Kabupaten Bekasi merupakan pameran produk pembangunan daerah yang diselenggarakan setiap tahun dan menjadi kalender kegiatan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten yang didukung oleh Dinas-Dinas terkait dan perusahaan swasta serta masyarakat setempat.

Pekan Raya Bekasi merupakan sarana mempromosikan berbagai produk atas kemajuan yang dicapai selama ini guna membuka peluang usaha maupun investasi yang ada di kabupaten Bekasi serta memberi kesempatan kepada pengusaha kecil, menengah dan besar untuk melakukan promosi sekaligus transaksi dagang langsung maupun transaksi pasca kegiatan Pekan Raya Kabupaten Bekasi

Terselenggaranya *event* ini diharapkan akan terjadinya pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama dalam produk industri kecil sehingga menimbulkan persaingan yang positif di antara produsen untuk mencapai kualitas produk maupun kuantitas yang dihasilkan guna mencapai produk unggulan dan menghasilkan trademark bagi industri kecil serta menjadi kebanggaan bagi pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah dengan mempunyai ciri produk dari Kabupaten Bekasi.

Maksud dan tujuan kegiatan Pekan Raya Kabupaten Bekasi Tahun 2018 ini, adalah:

- a. Menyampaikan informasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah,

- b. Mempromosikan potensi perekonomian daerah dari pelaku usaha, baik yang berskala kecil, menengah dan besar serta BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi untuk saling berinteraksi dengan para calon konsumen guna memperluas jaringan pasar dan menjalin kemitraan,
- c. Sebagai media hiburan bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-68 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73.

Melalui penyelenggara Pekan Raya Kabupaten Bekasi Tahun 2018, sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terpromosinya potensi perekonomian Kabupaten Bekasi,
- b. Terjadinya interaksi langsung antar pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan konsumen, Terbukanya peluang usaha, perluasan kesempatan kerjasama dan peningkatan pendapatan masyarakat,
- c. Tercapainya respon positif bagi peserta dan pengunjung terhadap kegiatan Pekan Raya Kabupaten Bekasi, sebagai media untuk membangun kecintaan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sendiri.

Pada dasarnya, pengembangan ekonomi lokal menjadi tujuan utama dari Pekan Raya Kabupaten Bekasi tahun 2018, karena salah satu tujuan Pekan Raya ini adalah mempromosikan potensi perekonomian daerah dari para pelaku usaha, baik yang berskala kecil, menengah dan besar serta BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi untuk saling berinteraksi dengan para calon konsumen guna memperluas jaringan pasar dan menjalin kemitraan.

Pekan Raya Kabupaten Bekasi Tahun 2018 sebagai sarana mempromosikan perkembangan potensi perekonomian di Kabupaten Bekasi, sehingga diperlukan langkah lebih lanjut untuk pengembangan ekonomi lokal agar terbuka peluang usaha, kesempatan perluasan kerja serta terjadinya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Pekan Raya ini, setiap kecamatan diimbau untuk menampilkan produk-produk unggulan lokal masing-masing kecamatan untuk dipromosikan kepada masyarakat.

Proses pelaksanaan Pekan Raya Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dalam pengembangan ekonomi lokal berjalan secara lancar dan selalu menarik antusias masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mengetahui pembangunan dan potensi usaha

masyarakat di Kabupaten Bekasi. Untuk jangka pendek, Pekan Raya Kabupaten Bekasi efektif dalam pengembangan ekonomi lokal, karena dalam acara tersebut terjadi proses interaksi antara para pelaku usaha dan konsumen sehingga setiap Pekan Raya Kabupaten Bekasi dihasilkan omset yang besar.

Produk-produk yang dipromosikan dalam Pekan Raya Kabupaten Bekasi Tahun 2018 adalah hasil pembangunan dan produk-produk unggulan, produk-produk peserta dan produk perdagangan. Di antara potensi pengembangan ekonomi lokal terdapat pada tiga kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tarumajaya potensi ekonomi lokal yaitu Batik
2. Kecamatan Sukatani potensi ekonomi lokal yaitu Dodol
3. Kecamatan Bojong Mangu potensi ekonomi lokal yaitu Anyaman

Pelaksanaan Pekan Raya Kabupaten Bekasi dinilai telah memenuhi harapan, karena pada kegiatan ini selalu ada keberlanjutan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pekan Raya Kabupaten Bekasi dinilai dapat mempromosikan ekonomi lokal, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan produk unggulan yang publikasikan kepada masyarakat. Meski demikian, paku pelaksanaan Pekan Raya kabupaten Bekasi relatif singkat, sehingga informasi produk lokal masih kurang maksimal terpublikasikan ke masyarakat luas. Selain itu, kegiatan ini juga belum memiliki area khusus/gedung khusus, sehingga lokasi pelaksanaannya selalu berpindah-pindah setiap tahunnya.

Secara teoretis implementasi kebijakan publik Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2018, telah memenuhi variabel komunikasi. Semua variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi perintah dimiliki oleh proses implementasi kebijakan tersebut. Akhirnya tujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dapat dipenuhi dengan dipromosikannya seluruh potensi ekonomi lokal di setiap kecamatan pada pameran Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2018



## Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiharsono. *Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*. 2015.
- Nurzaman, S.S. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis*. ITB, Bandung.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumiharjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Puskomedia.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wijayanti, Silvera Sekar dan Darwanto. *Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pembentukan Klaster di Kabupaten Semarang*. Ecces. 2016: 35-57.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Media Pressindo.